

DILEMATIKA SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Herawati¹, Mutiawati²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23114, Indonesia

Korespondensi Penulis: ¹herawati@uui.ac.id; ²mutia@uui.ac.id

Abstrak

Pendidikan nasional sedang menghadapi dua tantangan besar, yakni: tantangan internal dan eksternal. Secara internal, Indonesia dihadapkan pada temuan berbagai hasil studi yang menempatkan Indonesia pada ranking terbawah dalam kualitas pendidikan. Sedangkan tantangan eksternal berasal dari perubahan cepat dan signifikan dari lingkungan strategis di luar Indonesia, seperti tuntutan agar Indonesia siap bersaing ketat mencetak SDM-SDM bangsa yang unggul dan berkompeten; sehingga mampu berkompetisi secara global, baik nasional maupun internasional. Untuk menghadapi kedua tantangan tersebut, perlu adanya perubahan dan inovasi pendidikan secara massal agar kualitas pendidikan nasional dapat ditingkatkan. Namun kenyataannya, dilema dan berbagai bentuk kegagalan pendidikan dan system pendidikan di Indonesia justru semakin muncul ke permukaan wajah pendidikan Indonesia, antara lain: standar kelulusan UN yang tidak mampu mengakomodasi kemampuan siswa secara nasional, mahalnya biaya pendidikan, adanya kecurangan-kecurangan akademis dengan adanya gerakan menjual kursi kepada calon mahasiswa dengan harga tinggi sehingga hanya dapat dipenuhi oleh masyarakat ekonomi mapan. Oleh karena itu, fokus masalah kajian ini tertuju pada bagaimana carut marut sistem pendidikan di Indonesia dan apa saja faktor-faktor penyebab dilematika tersebut. Untuk itu setiap uraian dan paparan kajian ini dianalisis secara kualitatif melalui hasil studi kepustakaan (*library research*). Dimana hasil kajian menunjukkan bahwa: berbagai ketimpangan dalam sistem pendidikan sekolah berdampak signifikan terhadap minimnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kurikulum yang kurang matang, kecurangan dalam ujian nasional (UN) dan korupsi anggaran pendidikan. Untuk dapat memperbaiki ketimpangan-ketimpangan tersebut, perlu dilakukan pembenahan pada aspek: desentralisasi kurikulum secara utuh di sekolah, pemberdayaan guru, penghapusan UN dan peningkatan jumlah anggaran pendidikan secara tepat dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Dilematika, Sistem, Pendidikan

Dilematics Education System in Indonesia

Abstract

National education is facing two major challenges, namely: internal and external challenges. Internally, Indonesia is faced with the findings of various studies that place Indonesia at the bottom of the quality of education. Whereas external challenges stem from the rapid and significant changes of the strategic environment outside Indonesia, such as the demand that Indonesia be ready to compete to produce superior and competent national human resources; so that they can compete globally, both nationally and

internationally. To face these two challenges, there needs to be a change and innovation in mass education so that the quality of national education can be improved. But in reality, the dilemmas and various forms of failure of education and the education system in Indonesia have increasingly surfaced in the face of Indonesian education, including: UN graduation standards that are not able to accommodate the ability of students nationally, the high cost of education, the existence of academic cheats by the movement sell seats to prospective students at high prices so that they can only be met by established economic communities. Therefore, the focus of this study's problem is on how chaotic the education system in Indonesia is and what are the causes of the dilemma. For this reason, each description and presentation of this study is analyzed qualitatively through the results of library research. Where the results of the study show that: various gaps in the school education system have a significant impact on the lack of quality education in Indonesia. This is influenced by several factors, including: an undercooked curriculum, cheating in the national examination (UN) and corruption in the education budget. To be able to correct these disparities, improvements need to be made in aspects: decentralization of the curriculum as a whole in schools, teacher empowerment, elimination of the UN and increasing the amount of the education budget appropriately and continuously.

Keywords: Dilemma, System, Education

PENDAHULUAN

Secara umum pendidikan nasional sedang menghadapi dua tantangan yang berat, yaitu: tantangan internal dan eksternal. Secara internal, Indonesia dihadapkan pada hasil-hasil studi internasional yang selalu menempatkannya pada posisi juru kunci pendidikan dan ranking atas untuk korupsi. Kondisi semacam ini diucapkan secara berulang-ulang, sehingga membentuk konsep diri bahwa pendidikan Indonesia buruk, tidak bermutu dan terbelakang. Seumpama hasil PERC (*the Political and Economic Risk Consultancy*) tahun 2004 tentang *Corruption Country*, menempatkan Indonesia pada ranking pertama se-Asia, dengan indeks 9,25. Sedangkan dalam hal pembangunan manusia, meliputi: pendidikan, kependudukan dan kesehatan; UNDP dalam laporannya *Human Development Report* 2004 hanya menempatkan Indonesia di peringkat 111 dari 117 negara. Indonesia tertinggal dari negara tetangganya Malaysia (Muhaimin, 2006:71).

Kunci kemajuan Malaysia, menurut Muhaimin (2006:72) terletak pada tingginya anggaran pendidikan dan tingginya perhatian pemerintah pada profesionalisme guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai, di samping variabel-variabel lain seperti: kurikulum, sarana, fasilitas dan sebagainya. berbeda halnya dengan Indonesia, komponen profesionalisme guru masih terindikasi sakit keras; baik input, distribusi, mutu akademik, aktivitas ilmiah maupun kelayakan atau penguasaan di bidangnya. Sehubungan dengan hal ini, Muhaimin dalam bukunya "*Nuasa Baru Pendidikan Islam*" mengemukakan hasil studi Balitbang tahun 2001 yang menunjukkan mutu akademik guru SD dari 1.141.168 guru ternyata 2,63% (29.999) berpendidikan SMP, 56,10% (640.154) berpendidikan SMA/SMK, 2,54% (28.968) berpendidikan PGSLP/D1, 29,59% (337.624) berpendidikan PGSLA/D2, 2,68% (30.593) berpendidikan Sarjana Muda/D3, 6,43% (73.438) berpendidikan S1 dan 0,03% (392) berpendidikan S2.

Di sisi lain, Indonesia dihadapkan dengan tantangan eksternal, yaitu

perubahan yang cepat dari lingkungan strategis di luar Indonesia. Pasar bebas ASEAN (AFTA) berlaku sejak 2003 dan kini bekerjasama dengan ekonomi Asia Pasifik (APEC) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak bisa mengelak dari tekanan tersebut. Hal ini berdampak pada kompetensi tenaga kerja yang demikian ketat, terutama saat berhadapan dengan tenaga-tenaga kerja asing yang turut berebut memasuki pasaran kerja di Indonesia.

Menghadapi kedua tantangan tersebut, maka perubahan dan inovasi pendidikan merupakan “kata kunci” yang perlu dijadikan titik tolak dalam memperbaiki dan membenahi kualitas pendidikan nasional. Pemerintah mengakui telah berupaya melakukan optimalisasi perubahan dan inovasi-inovasi pendidikan tersebut. Namun kenyataannya, dilema dan berbagai bentuk kegagalan justru semakin muncul ke permukaan wajah pendidikan Indonesia, antara lain:

1. Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menggunakan standar kelulusan secara nasional dan hanya menguji mata pelajaran yang telah ditetapkan dengan mengabaikan beberapa faktor yang tidak mungkin dijangkau oleh seluruh siswa dan tidak mengakomodasi kemampuan siswa yang lain.
2. Mahalnya biaya pendidikan, sehingga hanya bisa diakses oleh warga negara yang mapan secara ekonomi.
3. Privatisasi PTN atau swastanisasi PTN memaksa petinggi di PTN untuk memikirkan cara memperoleh dana kelangsungan tridharma perguruan tinggi. Salah satu caranya dengan menjual kursi kepada calon mahasiswa dengan harga tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh rakyat ekonomi mapan.

Menurut Kordi K (2013:vi-viii), selain dari tiga permasalahan di atas, dilematika pendidikan di Indonesia juga ditambah dengan kualitas guru dan dosen

yang rendah, bangunan sekolah yang kurang layak, sekolah di desa terpencil yang kekurangan guru dan perlengkapan belajar, sekolah menjadi komoditas bisnis, kekerasan di sekolah dan seterusnya adalah berbagai hal yang melingkupi pendidikan di negeri ini.

Selain pemerintah, sekolah juga bertanggungjawab dan memiliki peran penting dalam memperbaiki carut marut pendidikan saat ini, namun hal sebaliknya justru terjadi. Manusia sekolah yang seharusnya cinta damai, toleran, inklusif dan mengedepankan dialog dari pada otot. Kenyataannya cacat, kekerasan dan adu otot dari jalanan hingga parlemen dilakukan oleh manusia-manusia sekolah. Hal ini tidak terlepas dari adanya sekolah yang dioperasionalkan dengan kekerasan, sehingga tidak heran akan mencetak generasi-generasi bermental keras pula. Hal tersebut menunjukkan pergeseran peran sekolah dan terindikasi adanya ketimpangan sistem pendidikan dari yang semestinya. Pada hakikatnya, sebuah sekolah diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai salah satu tempat penanaman akhlak (budi pekerti) yang utama di dalam jiwa anak, menyiramnya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga tertanam kuat dalam jiwa dan membuahkannya keutamaan, kebaikan dan suka beramal untuk kemanfaatan tanah air (<http://konsep-islam.blogspot.co.id>).

Keberhasilan suatu proses pendidikan di sekolah dapat dilihat dari kebermaknaan pendidikan itu sendiri bagi kehidupan siswa. Tatkala suatu proses pendidikan dijalankan ala kadarnya tanpa arah dan tujuan yang jelas serta tidak menerapkan dasar-dasar pendidikan yang benar dan sesuai, maka hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan, stres, bahkan keterpurukan siswa dalam menjalani berbagai permasalahan hidupnya di masa mendatang. sehingga tidak jarang, ada siswa yang memilih narkoba, tawuran,

bullying, seks bebas dan perilaku ekstrim lainnya sebagai identitas diri dan kepribadiannya. Apabila sekolah menyatakan telah berupaya membentuk manusia-manusia pendidikan yang santun/berakhlakul karimah, inovatif, kreatif, mandiri, berkompeten dan sebagainya; akan tetapi mengapa hal sebaliknya justru terjadi hampir di seluruh pelosok negeri ini. Jika kondisi ini senantiasa berlaku, maka motivasi memperbaiki wajah kusam pendidikan negeri ini tidak akan pernah memperoleh hasil optimal sesuai harapan dan cita-cita bangsa dan negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencatat seluruh temuan terkait dilematika dan carut marut pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur, sumber, dan temuan-temuan terbaru. Selain itu, setiap catatan yang diperoleh dianalisis dan dipadukan dengan berbagai temuan baru yang relevan dengan fokus kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN CARUT MARUT PENDIDIKAN SISTEM PENDIDIKAN DI SEKOLAH

A. Tujuan Pendidikan di Sekolah

John Dewey mengemukakan bahwa “pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman sedemikian sehingga mampu menambah makna pengalaman tersebut, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan arah pada pengalaman yang berikutnya”. Rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik

mengenai problematika sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi manusia secara global, dan untuk membina serta membekali peserta didik dengan kemampuan-kemampuan dasar agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut (Assegaf, 2011:208-209).

Amstrong (2011: 28) mengemukakan bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk mendidik siswa menjadi manusia seutuhnya. Hal ini merujuk pada tujuan pendidikan nasional menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3) yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (Rifai, 2011:48).

Upaya-upaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan ideal tersebut, hendaknya diselaraskan dengan kurikulum yang berdayaguna, fasilitas pendidikan yang memadai, metode pendidikan yang bervariasi, kebijakan-kebijakan pendidikan yang efektif, manajemen pendidikan yang modern, materi/pengetahuan yang terintegrasi dengan landasan Islam (al-Quran dan al-Hadits), menerima masukan dan model-model pendidikan modern selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam hakiki. Lebih rinci, Ibrahim (2013: 29-30) menawarkan beberapa upaya pembenahan kualitas pendidikan sebagai berikut:

1. Orientasi pendidikan ditekankan pada aspek afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendidikan lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter dan pembekalan keterampilan atau *skill*;

tidak sekedar mengandalkan aspek kognitif (pengetahuan).

2. Proses belajar mengembangkan pola *student oriented* sehingga terbentuk karakter kemandirian, tanggungjawab, kreatif dan inovatif pada diri peserta didik.
3. Pendidik memahami perbedaan mendidik dan mengajar, sehingga proses pembelajaran bertujuan untuk membentuk kepribadian dan mendewasakan peserta didik, tidak sekedar *transfer of knowledge* melainkan *transfer of value and skill* serta pembentukan karakter (*character building*).
4. Upaya pembinaan/pelatihan untuk peningkatan motivasi belajar peserta didik agar memiliki minat belajar yang tinggi.
5. Pendidikan berorientasi pada proses (*process oriented*), dimana proses lebih penting daripada hasil.
6. Sistem pendidikan sekolah kejuruan dapat diterapkan pada sekolah-sekolah umum dengan menyeimbangkan antara teori dengan praktik.
7. Perlunya dukungan dan partisipasi secara komprehensif terhadap praktik pendidikan dengan melibatkan semua pihak, terutama masyarakat sekitar sekolah sehingga memudahkan akses pendidikan secara meluas ke kalangan masyarakat.
8. Profesi guru bersifat ilmiah dan profesional, bukan sekedar kemanusiaan. Dengan tetap memperhatikan kesejahteraannya, bukan sekedar anggapan pahlawan tanpa tanda jasa.
9. Pemerintah hendaknya memiliki formula kebijakan dan konsistensi untuk mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan, salah satunya fasilitas pendidikan.

Menurut Mudyahardjo (2001: 156), upaya-upaya pembenahan dan inovasi pendidikan dapat diwujudkan dalam

sebuah sekolah yang memiliki beberapa karakteristik berikut:

1. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai lembaga utama melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Lembaga pendidikan bertugas mengembangkan insinyur-insinyur sosial, warga-warga negara yang mempunyai tujuan mengubah secara radikal wajah masyarakat masa kini.
3. Lembaga pendidikan bertujuan membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi manusia dalam skala global dengan mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Demikian uraian hakikat dan tujuan pendidikan yang seyogyanya diaplikasikan dalam sistem pendidikan di sekolah. Sistem dan proses pendidikan yang baik akan menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas. Namun kerap kali harapan yang tertuang dalam tujuan pendidikan, tidak terealisasi secara optimal karena ditemui berbagai ketimpangan di dalam proses pelaksanaannya.

B. Politik Pendidikan

Manusia baik secara individu dan kelompok masyarakat merupakan aspek terpenting dalam pendidikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan dan pembenahan proses pendidikan. Manusia adalah hasil dari proses pendidikan. Sumbangan-sumbangan pendidikan bagi kepentingan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi para guru berkenaan dengan konsep sifat dasar manusia. Sifat dasar ini salah satunya berkenaan dengan fitrah manusia. Hakikat fitrah disebutkan di dalam QS. Al-Rum:30 diartikan dengan agama (*din*).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم: ٣٠)

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. Al-Rum: 30).

Terkait fitrah manusia ini, Abdullah (2001: 56-57) menjelaskan bahwa fitrah dengan *din* memiliki hubungan dan tidak bertentangan bahkan keduanya dipandang saling melengkapi dan menguatkan. Secara mendalam, para guru mengakui bahwa teori dan praktek pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana sang guru memandang aspek sifat dasar manusia. Konsep fitrah juga menuntut pendidikan Islam agar mengarahkan prosesnya dalam pembentukan jalinan/ikatan kuat seorang manusia dengan penciptanya (Allah swt). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manusia dan fitrahnya (agama) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat yang menjadi bagian penting dari sebuah negara. Dasar pembentukan sebuah negara hendaknya juga berlandaskan pertimbangan agama; bukan semata-mata dilatar belakangi unsur politik yang bertentangan dengan Islam dan melupakan pertimbangan kemaslahatan manusia dalam perebutan dan pertahanan kekuasaan di dalam sebuah negara.

Sekolah dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di suatu negara, begitu juga sebaliknya. Pendidikan dan politik suatu negara memiliki hubungan dinamis yang saling melengkapi

satu sama lainnya. Pendidikan dijadikan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau penopang kerangka politik. Plato memulai kajiannya di Barat terkait hal ini dalam bukunya "*Republic*" yang mengupas hubungan ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur politik, sebaliknya setiap aktivitas politik juga ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan (Sirozi, 2010: 6-7).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fitrah manusia sebagai hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah swt; wajib menjadikan agama sebagai tolak ukur setiap aktivitas hidupnya. Oleh karena itu fitrah ini sepatutnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan, politik, ekonomi dan sosial sebuah negara. Sebagaimana halnya pendidikan, fitrah juga menjadi salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar penguat bangsa dan penentu maju mundurnya sebuah negara. Sehingga dalam proses pembelajarannya, selain memuat berbagai pengetahuan dan pengalaman; pendidikan di sebuah sekolah juga berperan mendistribusikan paham-paham dan kebijakan-kebijakan negara sebagai rangkaian penanaman ideologi bangsa untuk mencapai kesamaan visi dan misi dalam memajukan bangsa dan negara yang tidak bertentangan dengan fitrah (agama). Dalam ruang lingkup pendidikan, hal ini secara spesifik dikaji dengan istilah politik pendidikan.

C. Bentuk-bentuk Ketimpangan Sistem Pendidikan di Sekolah

Arah pendidikan dewasa ini seperti komoditas atau barang dagangan saja. Institusi pendidikan (sekolah) berpijak pada selera pasar tidak ubahnya seperti pabrik pencetak mesin-mesin manusia siap kerja namun miskin inovasi. Pendidikan

difokuskan pada perolehan hasil tanpa memperhatikan proses, menjadikan peserta didik sebagai insan-insan yang berorientasi pada nilai dan uang. Pada akhirnya, tidak mengherankan, apabila pergeseran arah tujuan tersebut menimbulkan berbagai ketimpangan dalam dunia pendidikan. Beberapa ketimpangan sistem pendidikan yang kerap ditemui di sekolah-sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurikulum Sekolah yang Menakutkan

Menurut Faure (2001: 258-260), kurikulum pendidikan saat ini kerap dirasakan sebagai hantu yang menakutkan bagi masyarakat. Masyarakat dirisaukan oleh kecenderungan pemerintah dalam upaya menyeragamkan berbagai aspek pendidikan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi; yang dirasakan memasung kebebasan dan kreatifitas. Kurikulum sentral atau kurikulum nasional akan mengakibatkan infleksibilitas dan ketertinggalan. Sentralisme membuka kekuatan-kekuatan ekonomi masuk dan menjadikan sekolah sebagai lahan bisnis empuk. Akibatnya selain membuatnya mahal di luar logika, banyak segi dari proses pendidikan terkesan berjalan lebih pada mengikuti hukum-hukum bisnis daripada prinsip-prinsip pedagogis dan psikologis yang semestinya.

Lebih lanjut Faure (2001: 202) menyatakan bahwa beberapa pengamat menilai bahwa pemerintah Indonesia kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan. Demikian pula halnya kebijakan terkait kurikulum pendidikan yang hampir setiap pergantian periode pemerintahan turut mengalami perubahan/pergantian. Di Indonesia dalam 30 tahun terakhir telah dilakukan beberapa kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu pada tahun 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006 (Supriadi, 2008: 173). Bahkan saat ini telah diberlakukan kurikulum 2013 yang

dimaksudkan untuk menyempurnakan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kendati implementasinya belum menyeluruh ke seluruh pelosok wilayah nusantara dan belum mampu mendongkrak keterpurukan kualitas pendidikan Indonesia.

Ramayulis (2010: 149) mengemukakan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada setiap jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa itu sendiri. Oleh karena itu berdampak pada perbedaan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa dan negara. Demikian pula perubahan politik dalam suatu negara; turut mempengaruhi bidang pendidikan, yang sering berakibat pada terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa kurikulum seyogyanya bersifat dinamis agar lebih menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, baik sosial kultural, Iptek, dsb. Namun kenyataan sebaliknya justru terjadi. Sehubungan dengan hal ini, Zulkifli dan Emyurika (2014: 81) menyatakan bahwa perubahan sistem pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh penguasa dan bernuansa politis. Kurikulum Indonesia dijejal dengan dengan berbagai kebutuhan yang sangat tergantung pada penguasa.

Pergantian kurikulum di Indonesia selalu berhubungan dengan kekuasaan dan perangkat lainnya menjadi konstelasi atau ajang pengaruh kekuasaan. Sehingga arah dan substansi kurikulum hanya ditentukan oleh keputusan-keputusan pemegang kekuasaan Negara maupun subsistem non negaranya, atau menurut aliran kepentingannya dalam bidang pendidikan. Akhirnya kajian atas kurikulum lambat laun akan menjadi jenuh serta kehilangan relevansi untuk meningkatkan kualitas dan

mutu pendidikan. Yusran Pora mengemukakan bahwa kurikulum sekolah saat ini merupakan pemaksaan dan penekanan yang benar-benar mengerikan dibandingkan dengan bentuk pemaksaan dan penekanan lainnya. Peserta didik dipaksa untuk melakukan ini dan itu, dikarenakan muatan kurikulum tersebut masih banyak konstelasi kekuasaan ketika merancang (2015: 38).

2. Rendahnya Profesionalisme Guru

Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Namun seribu satu macam masalah menjadi bagian hidup dari guru. Dua hal yang paling krusial adalah kualitas guru yang sangat rendah dan gaji/upah yang rendah. Kedua faktor ini terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, langsung maupun tidak langsung. Secara intelektual, banyak guru yang tidak layak mengajar. Sebuah penelitian dan survei yang dikutip dari *Harian Media Indonesia* edisi 05 Januari 2001; membuktikan hal tersebut. Hasil uji coba 27 guru SMA di Jakarta dalam bidang IPA dan matematika misalnya, lebih dari 50% di antaranya memperoleh skor nol dan 30% skor 3 dari kemungkinan tertinggi 100. Nilai 3 ini juga adalah nilai tertinggi pada guru tersebut. Ini adalah kenyataan kecil intelektualitas guru. Celaknya, dalam kondisi serba kekurangan, guru dipaksa mengejar target kurikulum (Kordi K, 2013: 36).

Selain itu, ada pergeseran citra masyarakat terhadap profesi guru saat ini. Citra profesi guru pada zaman penjajahan dan awal kemerdekaan Indonesia cukup tinggi di mata masyarakat. Secara politis guru juga dibutuhkan pemerintahan penjajah dalam rangka menunjang politik etisnya. Pada saat ini citra dan status profesi guru mengalami kemerosotan. Hal ini dikarenakan terjadinya “peretakan” guru secara masal dan kurang terkoordinasinya pengadaan, pemanfaatan dan pembinaan tenaga keguruan. Selain itu

disebabkan menjamurnya sekolah-sekolah untuk mendidik calon guru, bahkan banyak di antaranya yang bermutu rendah; baik dari aspek: mahasiswa, dosen, administrasi pendidikan sampai ke sarana dan prasarana. Kesemrawutan pengelolaan lembaga pendidikan tenaga keguruan, menurut Faure (2001: 196-197) mengakibatkan ketidak sesuaian antara jumlah, kualifikasi serta persebaran lulusannya dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Rendahnya mutu guru tampak terlihat dari gejala-gejala berikut:

- 1) Lemahnya penguasaan bahan ajar;
- 2) Ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dengan bidang yang diajarkan di sekolah;
- 3) Kurang efektifnya cara pengajaran;
- 4) Kurang wibawanya guru di hadapan siswa;
- 5) Lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh, semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul menjadi guru;
- 6) Kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir dan keteguhan sikap seorang guru yang menunjukkan ketidaksiapannya sebagai seorang guru (sebatas sebagai pengajar, sedikit yang mampu menjadi seorang pendidik);
- 7) Relatif lebih rendahnya intelektual para mahasiswa calon guru yang masuk LPTK dibandingkan dengan yang masuk universitas.

Rendahnya mutu guru akibat kesemrawutan sistem pendidikan calon guru ini berdampak pada merosotnya status guru di mata masyarakat. Profesi guru dipandang sebagai profesi mudah dan murah, sehingga imbalan jasanya pun dibayar lebih murah dibandingkan profesi-profesi lain yang dianggap lebih bergengsi disebabkan biaya pendidikannya yang lebih mahal. Rendahnya gaji guru, memaksanya untuk mencari tambahan penghasilan dengan berbagai bentuk

pekerjaan yang sekiranya dapat memberikannya pendapatan lebih. Alhasil, persiapan mengajar, perhatian terhadap peserta didik, peningkatan mutu pengajaran; tidak lagi menjadi fokus utama. Hal ini tentu menggadai kualitas produk pendidikan yang dihasilkan dalam tanggungjawabnya.

Selain itu, merebaknya sikap materialisme dan konsumerisme di masyarakat menyebabkan terjadinya kemerosotan moral di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kepentingan bisnis yang membawa keuntungan material mengalahkan kepentingan pendidikan. Hampir semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik birokrasi pemerintah, yayasan, kepala sekolah, guru, karyawan, orangtua siswa maupun siswa sendiri tergoda oleh nilai rupiah. Maka tidaklah mengherankan terjadinya kasus: jual-beli ijazah, nilai, tempat duduk, soal ujian atau ulangan, buku pelajaran, pakaian seragam, jasa kepariwisataan, dan sebagainya. Hubungan guru-siswa semakin kurang menunjukkan hubungan antarpribadi pendidik dengan peserta didik, tetapi tergantikan dengan hubungan fungsional antara penjual jasa dan pembelinya.

Mengembalikan citra profesi guru sebagaimana pada masa pra kemerdekaan jelas sulit. Namun, jika ada kehendak politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menghargai profesi guru; setidaknya masalah ini dapat diminimalisir dengan melakukan beberapa hal berikut:

- 1) Perbaikan insentif material dan kesejahteraan hidup;
- 2) Kesungguhan dari pengelola LPTK dalam mendidik para calon guru yang bermutu;
- 3) Upaya-upaya organisasi profesi keguruan maupun para guru itu sendiri dalam meningkatkan profesionalitas dan kredibilitasnya di mata masyarakat (Sudarminta, 2016: 261-264).

Selain itu, Ibrahim (2013: 23-24) pemerintah dipandang perlu menyeleksi LPTK-LPTK yang telah ada saat ini secara kualitas dan memperketat perizinan lahirnya LPTK-LPTK baru dengan syarat dan ketentuan ketat; mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Permendiknas No. 8 tahun 2009; Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidikan profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Darmaningtyas mengemukakan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan seyogyanya diiringi dengan proses pemberdayaan guru. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan guru, antara lain: melatih kepekaan guru, membenahi IKIP, memperbaiki kesejahteraan guru, membebaskan guru dari kewajiban membuat PSP (Program Satuan Peajaran), dan menjadikan guru sebagai fasilitator (Darmaningtyas, 1999: 183-191).

3. Kecurangan dan Polemik Ujian Nasional (UN)

Era globalisasi ditandai dengan persaingan ekonomi yang ketat, beriringan dengan terjadinya revolusi teknologi informasi, komunikasi dan industri. Persaingan ini menyebabkan tidak adanya jarak dan batasan antara satu orang dengan yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya serta satu negara dengan negara lainnya. Kondisi ini menuntut setiap negara untuk berbenah diri dalam menghadapi persaingan global. Jawaban

atas tantangan ini adalah dengan membenahi kualitas SDM bangsa. Dengan demikian, pendidikan mengambil peran penting dan utama dalam upaya membentuk SDM yang berkualitas, berdaya saing, berwawasan luas, profesional, visioner, percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi, serta memiliki keterampilan yang memadai (Ibrahim, 2013: 26-28).

Sekolah sebagai institusi pendidikan, dituntut mampu menjamin kualitas lulusan dengan standar kompetensi global, sehingga mampu bersaing secara optimal. Kenyataannya, sampai saat ini para lulusan belum mampu menjawab tantangan zaman, terbukti dengan kualitas sebagian besar lulusan lebih berkutat pada kompetensi pengetahuan; “tahu ilmu, hafal rumus, tapi tidak terampil dan gagap aplikasi”. Kendati sekolah telah mengklaim optimalisasi upaya pendidikan, namun hasil tidak menunjukkan kesesuaian pengakuan dengan kenyataan di lapangan.

Lebih lanjut Chatib (2011: 93-94) mendefinisikan sekolah unggul sebagai sekolah yang para gurunya menjamin semua siswa akan dibimbing ke arah perubahan yang lebih baik (baik kualitas akademis maupun moral). Dengan kata lain, sekolah yang gurunya mampu mengubah kualitas akademis dan moral siswanya dari negatif (bodoh dan nakal) menjadi positif, itulah sekolah unggul. Oleh karena itu, upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan harus diarahkan kepada perbaikan proses pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik/guru yang berkompeten, selain ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta iklim sekolah yang kondusif melalui peningkatan proses pembelajaran yang memberikan kemampuan dasar (*competency-based*) dan berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills oriented*), menerapkan konsep dasar tuntas (*mastery learning*), membangkitkan

sikap kreatif, inovatif, demokratis dan kemandirian siswa (Ibrahim, 2013: 15).

Berdasarkan uraian di atas, seyogyanya sebuah sekolah menjalankan tugas dan tanggungjawab perubahan tersebut dengan baik dan optimal. Namun kenyataannya, banyak sekolah yang mengabaikan bahkan lebih mengutamakan kuantitas *output* daripada kualitas pembelajaran itu sendiri. Maka tidak mengherankan jika ditemui adanya sekolah yang lebih mengutamakan kelulusan UN siswa 100% dengan kecurangan, daripada hakikat kejujuran karena kekhawatiran minim kelulusan. Hal ini sudah barang tentu mementahkan upaya-upaya proses pendidikan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dalam rangka menanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri siswa. Disadari atau tidak, dalam hal ini sekolah turut berperan menyemai bibit-bibit kecurangan pada siswa yang akan berdampak pada pembentukan karakternya. Sebagian kecil dampak tersebut; siswa akan berprinsip bahwa “untuk memperoleh keberhasilan, dibenarkan melakukan berbagai upaya, termasuk halal melakukan kecurangan”.

Menurut Nata (1997: 178) ketimpangan ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, yang seharusnya berupaya untuk mendidik manusia dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya untuk dapat hidup dengan baik di masyarakat. Pendidikan adalah “suatu proses pembelajaran yang membiasakan warga masyarakat sedini mungkin menggali, memahami dan mengamalkan semua nilai yang disepakati sebagai nilai terpuji dan dikehendaki serta berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi (individu), masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan terhadap peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik (*insan kamil*)” (Ibrahim, 2013: 11).

Kecurangan bukanlah karakteristik pendidikan yang baik. Selain bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, terlebih utama kecurangan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shaleh sebagaimana termuat di dalam QS. Ali Imran ayat 137-138 yang artinya:

“Sungguh telah berlalu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). Inilah (Al-Quran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali Imran: 137-138).

Ketimpangan sistem pendidikan akan melahirkan berbagai dampak perilaku negatif pada diri siswa, seperti: korupsi, penipuan, pedagang yang curang, pengusaha yang tidak jujur dan sebagainya. Hal ini turut membuktikan kegagalan politik pendidikan untuk tujuan penanaman ideologi agama atau kepentingan agama Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia. Namun demikian, realita temuan di salah satu sekolah di Aceh, tatkala ada seorang guru yang menentang kebijakan sekolah untuk melakukan kecurangan; kepala sekolah justru memutasi guru bersangkutan ke sekolah terpencil tanpa mempertimbangkan alasan-alasan guru menentang kebijakan tersebut.

Uraian di atas menunjukkan salah satu gambaran ketimpangan sistem pendidikan yang masih berlangsung di Indonesia sampai sekarang. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh wacana prestasi akademik dan tuntutan nilai ujian yang lebih tinggi. Untuk pencapaian tujuan ini, kepala sekolah ditekan guna memenuhi agenda politik; agar guru bertanggungjawab dalam mengajar demi persiapan menghadapi ujian yang pada

akhirnya siswa bereaksi dengan cara mencontek (dengan usaha sendiri, bahkan dibantu oleh guru dan sekolah), menggunakan “steroid belajar” (obat perangsang fisik yang legal ataupun tidak legal) atau menjadi tidak peduli dalam mengatasi tuntutan yang mereka rasakan di sekolah. Amstrong (2011: 28) Petualangan belajar, keajaiban alam dan budaya, kekayaan pengalaman manusia dan kenikmatan memperoleh kemampuan baru; semua itu tampaknya sudah ditinggalkan atau tidak lagi dipedulikan, di dalam ruang kelas hanya demi memenuhi kuota, tenggat waktu, *benchmark*, mandat dan target. Dengan kondisi demikian, maka tidak mengherankan jika kualitas pendidikan Indonesia semakin memprihatinkan dan tidak mampu menghasilkan para lulusan terbaik yang memiliki kemampuan bersaing secara global.

Seyogyanya pemerintah, sekolah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan; tidak menjadikan tes formal, salah satunya UN sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan seorang siswa. Kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam *achievement test* (tes formal), sebab sebuah hasil penelitian membuktikan bahwa kecerdasan seseorang itu selalu berkembang (dinamis), tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu atau sepuluh tahun lagi. Menurut Gardner, kecerdasan dapat dilihat dari kebiasaan seseorang dan kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang (Chatib, 2011: 71).

Rendahnya mutu pendidikan terkait UN, Jamaluddin Idris berpendapat bahwa secara faktual; UN seharusnya sebagai pendorong PBM yang terfokus pada pengembangan keterampilan dasar mata pelajaran dengan pendekatan belajar aktif dan pemecahan masalah. Namun pemberlakuannya sebagai standar kelulusan justru menggeser tujuan utama

pendidikan. Alhasil, guru melaksanakan KBM apa adanya sesuai tradisi. Pembelajaran jadi terpusat pada guru yang didominasi dengan ceramah dan penuangan konsep secara dangkal. Sehingga siswa tidak termotivasi dan tidak terlatih merekonstruksi pengetahuan dan konsep berdasarkan proses mencari dan mengalami sendiri melalui: eksperimen, pengamatan, pemecahan masalah dan kegiatan praktek lainnya. Pendekatan konstruksi hanya tinggal sebagai mutiara dalam kurikulum (Idris, 2005: 69-70). Pencapaian nilai kelulusan rendah dan tujuan akhir pendidikan terabaikan, sehingga lahir para lulusan frustrasi yang tidak mampu mengaktualisasikan pengetahuannya secara terampil dalam kehidupan nyata, terbatas pada kemampuan menjawab soal dan pencapaian nilai semata.

Secara psikologis, ketimpangan ini telah merenggut dunia pendidikan anak, yaitu "masa bermain". Anak usia SD saat ini tidak lagi memiliki waktu bermain karena kuantitas beban tugas pelajaran, termasuk PR yang tidak masuk akal dan sebagian bersifat menghafal dan sebagainya (Faure, 2001: 177). Pada akhirnya sekolah dipandang tidak lagi menyenangkan oleh siswa. Tidak mengherankan akhirnya kualitas pendidikan Indonesia berada pada kategori masih jauh dari kata baik. Selain itu, Ujian Nasional (UN) yang menggunakan standar kelulusan secara nasional dan hanya menguji mata pelajaran yang telah ditetapkan dengan mengabaikan beberapa faktor yang tidak mungkin dijangkau oleh seluruh siswa dan tidak mengakomodasi kemampuan siswa lain di seluruh pelosok negeri yang terkadang jauh dari proses pendidikan yang layak.

Kendati orientasi pendidikan telah berubah ke arah desentralisasi, dimana kebijakan-kebijakan dalam proses pendidikan ditentukan sendiri secara otonomi oleh sekolah yang dikenal dengan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Namun hal ini tampak tidak berlaku untuk aspek kurikulum, karena tuntutan standar kelulusan UN diberlakukan secara nasional tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, salah satunya keragaman kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa.

Menurut Kordi K (2013: 32), bagaimana pun UN adalah bentuk pemaksaan pada birokrat di Depdiknas di tengah carut-marutnya sistem pendidikan negeri ini. Bagaimana mungkin seorang siswa yang belajar selama tiga tahun, kemudian kelulusannya hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual semata atau menyamakan siswa yang bersekolah di sekolah elit dengan siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang serba kekurangan. Para birokrat Depdiknas bertahan pada argumen bahwa UN merupakan alat ukur kualitas pendidikan nasional, sehingga BNSP berbangga dengan kenaikan nilai UN. Padahal kecerdasan intelektual yang identik dengan kemampuan menghafal, hanyalah satu dari kecerdasan-kecerdasan lain yang dimiliki siswa.

Seorang siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa di bidang seni musik atau seni lukis, sastra dan kecerdasan lainnya; tidak diluluskan hanya karena nilai satu atau dua mata pelajaran tidak mencukupi ketentuan UN. Dengan demikian, untuk apa dan siapa pendidikan ini dilaksanakan. Sedangkan di dalam UU Sisdiknas (UU No. 20/2003) menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; pasal 3 (Kordi K, 2013: 33).

Dengan demikian UN dianggap sebagai pengkhianat terhadap keragaman kemampuan/kecerdasan. Bahkan bakat alami (fitrah) seorang anak yang dibawa sejak lahir menjadi tidak berkembang dan hancur, karena UN memaksanya untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang tidak mampu membantunya untuk mengembangkan kreatifitas dan kemandirian. UN dipandang sebagai tangan perpanjangan, dimana perancangan sistem pendidikan adalah orang-orang yang melihat manusia tidak lebih dari komoditas. Karena itu pendidikan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem pendidikan nasional yang demikian, tidak hanya melahirkan manusia-manusia yang tidak berpendirian, tidak mandiri dan kreatif, koruptif, hipokrit, rasialis, diskriminatif; tetapi juga melahirkan barisan penganggur terdidik pencari kerja, yang berarti semakin menyumbang kemiskinan struktural. Kondisi ini akan berdampak pula pada minimnya kualitas lulusan secara personal dan ketidakmampuannya dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era global.

Kendati banyak pihak yang berpendapat tentang sisi negatif pelaksanaan UN, dikarenakan kegagalan-kegagalannya dalam pencapaian tujuan pendidikan, bahkan dinilai bertentangan dengan fitrah anak dan UU Sisdiknas No. 20/2003. Musthofa dalam penelitian Gunadi H. Sulistyio berpandangan berbeda terkait UN dengan menyatakan bahwa UN perlu didukung karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) UN merupakan bentuk idealisasi bangsa yang akan mampu mengikis pelecehan rendahnya mutu pendidikan nasional di tingkat global.
- 2) UN dapat berperan sebagai motivator belajar siswa dan mengembangkan semangat kompetisi siswa.

- 3) UN akan menggugah semangat dan motivasi guru untuk mengajar lebih baik.

- 4) Penentuan tiga matapelajaran yang diuji dipandang strategis untuk menjawab tantangan global.

Selain itu, Prameswari mengemukakan hal yang senada bahwa:

- 1) UN mampu menepis kesenjangan antar sekolah dan antar daerah tatkala melaksanakannya secara konsekuen;
- 2) UN menjadi langkah awal untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pendidikan (Sulistiyo, 2007: 80).

4. Korupsi Anggaran Pendidikan

Sirozi (2010: 59) memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga program-program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan *output* yang diinginkan. Hal ini menjadi salah satu alasan suatu negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk pendidikan.

Finlandia dinyatakan sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia dikarenakan anggaran pendidikan mendapat prioritas utama, meskipun bukan yang tertinggi di antara negara-negara Eropa lainnya. Leo Pahkin konselor pendidikan nasional Finlandia, terus memacu mutu pendidikan yang dipandang sebagai aset kemajuan bangsa dan menyatakan: "Kami menanam investasi yang besar di bidang pendidikan dan pelatihan agar bisa mencetak tenaga ahli dan terampil yang kelak menghasilkan inovasi" (Chatib, 2011: 26). Kondisi Finlandia dalam menangani pendidikan, tampak berbanding terbalik dengan pola penanganan pendidikan di Indonesia, yang tampak terfokus pada penekanan kurikulum dengan mengabaikan tujuan dan faktor-faktor penunjang pencapaian tujuan tersebut, salah satunya dana pendidikan. Dengan kata lain, rendahnya anggaran

dana pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab minimnya mutu pendidikan.

Pemerintah sepatutnya konsisten meningkatkan anggaran pendidikan, di samping senantiasa mengkoordinir penggunaannya secara tepat dan akurat. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan 20% anggaran untuk sektor pendidikan. Namun penggunaan dana tersebut tidak murni dialokasikan untuk operasional dana pendidikan. Selain itu, telah menjadi rahasia umum bahwa anggaran pendidikan banyak dikorup, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Sehingga anggaran pendidikan yang benar-benar dapat dinikmati siswa menjadi berkurang dan berdampak pada keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Permasalahan ini perlu segera dibenahi agar kualitas pendidikan dapat meningkat dengan ditunjang oleh kelengkapan fasilitas pendidikan yang ada (Sukoco, 2017).

Penyelewengan dana pendidikan utamanya dilakukan aparat dinas pendidikan di daerah dan sekolah. Peluang penyelewengan dana pendidikan itu terutama dalam alokasi dana rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah serta dana operasional sekolah. Menurut Febri, selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp 243,3 miliar. Kebocoran dana pendidikan yang paling besar terjadi dalam pengadaan gedung dan sarana prasarana sekolah. Hal itu disebabkan karena besarnya dana yang digunakan untuk pengadaannya, banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaannya, serta banyaknya celah korupsi dalam pengelolaan dana tersebut. Kebocoran anggaran ataupun dalam bentuk paling parah seperti korupsi pendidikan, ujar Ade, menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban biaya

yang harus ditanggung masyarakat, dan turunnya kualitas layanan pendidikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, korupsi pendidikan telah membahayakan nyawa peserta didik dalam bentuk ambruknya gedung sekolah. Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan menambahkan, potensi korupsi di sektor pendidikan hendaknya menjadi perhatian serius. Pejabat seperti: Mendiknas tidak bisa dari parpol yang punya kepentingan tertentu, harus independen, bebas korupsi, dan memahami betul persoalan dan perbaikan pendidikan nasional (Kompas, Edisi 09 September 2009).

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting di dalam dunia pendidikan. Pembiayaan pendidikan selalu mengharapakan komitmen pemerintah agar tidak berlepas tangan dalam arti selalu memperhatikan dari segi pembiayaan dengan jalan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan pendidikan. Pemerintah harus memiliki kesadaran terhadap pendidikan melalui pembiayaan, demi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pemerintah tidak bisa mengabaikan pendidikan generasi bangsa dengan meminimalisir angka putus sekolah. Dengan kata lain, pemerintah hendaknya menekan angka generasi putus sekolah dan mematahkan alasan faktor ekonomi sebagai dalih masyarakat Indonesia tidak mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu pemberian bantuan dana pendidikan, operasional sekolah dan beasiswa bagi siswa hendaknya benar-benar dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Berbagai ketimpangan sistem pendidikan di sekolah ini telah berlaku sejak lama. Peran pemerintah untuk menyelesaikan pelbagai masalah ini sangat diharapkan oleh seluruh pihak, terutama masyarakat yang memberikan amanah dan tanggungjawab tersebut kepadanya. Namun sampai saat ini, belum terlihat adanya upaya-upaya yang signifikan dari

pemerintah, sehingga terkesan melakukan pembiaran dan bersikap acuh tanpa adanya solusi dan penanganan ke arah yang lebih baik. Setiap adanya satu gerakan pembenahan, kerap berhenti di satu titik tanpa adanya upaya-upaya nyata sampai ke titik ketuntasan. Bahkan gerakan-gerakan tersebut lebih tepat disebut proyek pendidikan yang sarat kepentingan politik dan keuntungan perekonomian, dibandingkan sebagai lembaga yang mengambil langkah-langkah pembenahan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

Ketimpangan-ketimpangan dalam sistem pendidikan di sekolah akan berdampak pada minimnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kurikulum yang kurang matang, kecurangan dalam ujian nasional (UN) dan korupsi anggaran pendidikan. Untuk dapat memperbaiki ketimpangan-ketimpangan tersebut, perlu dilakukan pembenahan pada aspek: desentralisasi kurikulum secara utuh di sekolah, pemberdayaan guru, penghapusan UN dan peningkatan jumlah anggaran pendidikan secara tepat dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rachman (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin (1997). *Filsafat Pendidikan Islam 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Darmaningtyas (1999). *Pendidikan pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi, Dedi (2008). *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faure, Edgar (2001). *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Farid Wajdi (2013). *Dinamika Pendidikan Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Idris, Jamaluddin (2005). *Analisis Kritis Mutu Pendidikan*, (Banda Aceh: Taufiiyah Sa'adah.
- Konsep Islam, *Pendidikan Akhlak (Artikel)*, 2011. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 di <http://konsepislam.blogspot.co.id>
- Kordi K, M. Ghufuran H (2013). *Manusia Sekolah dan Sekolah Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sirozi, M (2010). *Politik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin (2006). *Nuansa Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Muhammad (2011). *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Chatib, Munif (2011). *Gurunya Manusia*, Bandung: Kaifa.
- (2011) *Sekolahnya Manusia*, Bandung: Kaifa.
- (2011) *Sekolahnya Manusia*, Bandung: Kaifa.
- Ramayulis (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Mudyahardjo, Redja (2001). *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abong, Rustam (2015). *Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia*, Jurnal At-Turats, Vol. 9 Nomor 2 Desember 2015.

Amstrong, Thomas (2011). *The Best Schools; Mendidik Siswa Menjadi Insan Cendekia Seutuhnya*, Bandung: Kaifa.

Zulkifli dan Emyurida (2014). *Dunia Pendidikan: Antara Dilema dan Harapan*, Jurnal Lentera Vol. V No. 14 14 Oktober 2014.